

DAFTAR PUSTAKA

- AR Anfeis, M. P. (2022). Effectiveness of BPHTB Verification and Validation Process for Land and Buildings in Bekasi City. *Legal Brief*, 11(5), 2977–2984.
- Arif Sutanto, H. (2024). Metode Riset Bisnis, Akuntansi dan Manajemen. In B. Arianto (Ed.), Eureka Media Aksara. <https://doi.org/EC002024186368>
- Cahyo Adhi Nugroho. (2023). Pengenaan Bphtb Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Dibawah Njop. *Jurnal Akta Notaris*, 2(2), 262–270.
- Ester, Milwan, & Riswanda. (2022). The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 338–352.
- Fath, A., Cantiga, S. P., & Sitanggang, M. J. (2023). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb). *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 100–114.
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pajak Daerah (2024).
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 1 (2023).
- Sukmana, S. U. T., Mardi, R. T., & Niravita, A. (2023). Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Melalui Penerapan Peraturan Undang-undang BPHTB: Tantangan dan Peluang. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(6), 190–206.
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. In H. Hadjarati (Ed.), *PT. Pustaka Indonesia Press* (Pertama). PT. Grafika Utama Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pasar Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Yulianti, A., & Herwinarni, Y. (2021). Tinjauan Pengajuan Permohonan Restitusi BPHTB atas Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 157–167.